

MAKNA *BHISAMA* KESUCIAN PURA (Kajian dari perspektif Arsitektur)

I Ketut Adhimastra

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

E-mail: Adhimastra2301@yahoo.com

ABSTRACT

In Balinese society, it's recently been occurred an emotional debate and dispute of argumentation related to the content of Bhisama Kesucian Pura (temple sacred agreement). An assessment is the realistic distance which emerges as an interpretation to Bhisama Kesucian Pura that will be decreased or narrowed. It's the critical point that's possible to be a further discussion centre item and then, advanced questions are : (i) "how many ideal quantitative values for the content of Bhisama Kesucian Pura do we convert?", (ii) "could it be 3 (three) kilometers, 4 (four) kilometers or more?". That's the continued discourse which can be proposed in the hermeneutic study.

And the proposed study seems that the result doesn't contribute the problem solving but it could be to emphasize on the emerging problem analysis. By a few refining on the analysis, it's proposed to the next study process.

Analytic scheme of thinking in the study is a deductive nature that's hypothetically-tentatively looking for the logic & ethic meaning on the content of Bhisama Kesucian Pura. It's said an hypothetic term because the truth (regarding the content of Bhisama Kesucian Pura) still need indeed to be tested its meaning anymore from the reflective thinking process perspective. It's said to be a deductive term because the early study setting comes from the empiric of non assumption but it derives from human's thinking or intellectual capability to try constructing an abstraction and simplification of an idealism of human's world. And it's said tentative item because the deductive concept is still give a chance to the other value choice that reflectively needs to be tested by its meaning anymore.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di kalangan masyarakat Bali telah terjadi perdebatan dan persilangan pendapat mengenai isi *bhisama* kesucian Pura. Dugaannya adalah jarak yang muncul sebagai pemaknaan terhadap *bhisama* kesucian Pura akan menciut atau berkurang. Inilah yang menjadi titik kritis yang mungkin merupakan topik bahasan lanjutannya dan

kemudihan menjadi pertanyaan ikutannya adalah seberapakah nilai kuantitatif yg ideal dalam memaknai isi *bhisama* tentang kesucian Pura?. Apakah 3 (tiga) km, 4 (empat) km, ataukah berapakah?. Inilah wacana ikutannya yang berhasil diajukan dalam kajian hermenetik ini.

Dan kajian yang telah diajukan, nampak hasilnya bukanlah untuk memberi- kan pemecahan masalah (problem solving) melainkan lebih kepada penekanan menguraikan permasalahan yang telah muncul tersebut. Dengan sedikit penghalus- an uraian untuk diusulkan dalam proses kajian selanjutnya.

Skema berpikir dalam kajian ini bersifat deduktif yang secara hipotetik tentatif mencari makna logik atau etik dari isi *bhisama* kesucian Pura. Disebut hipotetik karena kebenaran disini (mengenai isi *bhisama* kesucian pura) memang masih perlu diuji maknanya lagi dari perspektif proses berpikir reflektif. Disebut deduktif karena awal pembentukan kajian ini berasal dari asumsi yang bukan empirik melainkan dari suatu kemampuan pikir atau akal/ intelektual manusia untuk mencoba membangun suatu abstraksi & simplifikasi atau idealisme atas dunia manusia. Dan disebut tentatif karena konsepsual deduktif tersebut masih membuka peluang pilihan nilai lain, yang secara reflektif diuji lagi maknanya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut : bagaimanakah perdebatan dan persilangan isi *bhisama* tentang kesucaian Pura itu muncul kepermukaan?

II. PEMBAHASAN

Gerakan/pikiran yang menghentikan proses pemaknaan kembali tentang isi *bhisama* adalah suatu penyimpangan terhadap hukum alam yang senantiasa memberikan ruang kebebasan berpikir (Eka wakia bina sruthi sebagai mimbar kebebasan tafsir) bagi setiap insane/mahluk ciptaan Tuhan. Memang ada kekhawatiran jikalau suatu aturan yang tidak segera dikeluarkan, dapat menimbulkan chaos karena tiadanya atau kekosongan acuan yang akan dipergunakan dalam praktek kehidupan. Isi *bhisama* yang telah disepakati bersama adalah suatu teks tunggal (eka wakia) yakni “apeneleng agung untuk jarak kesucian pura”, namun statemen ini, oleh beberapa kepala akan memunculkan pandangan/pemaknaan yang berbeda-beda (bina sruti) atau multi tafsir.

Eka wakia atau teks tunggal dalam aturan arsitektur tradisional daerah Bali, seringkali bermakna jamak atau multi tafsir jika hendak dikonversi ke nilai-llai kuantitatif. Sebagai analogi dimana dalam membuat ukuran atau *gegulak* jarak *saka* ke *saka* pada bangunan arsitektur tradisional daerah Bali, maka muncul yang namanya *gegulak*: *Prabu wibuh, mantri angelayang, mantri asasarin, dewi anangkil* atau *mantri wijaya*. Pilihan atau alternatif ini adalah suatu teks tunggal (eka wakia), yang dapat diterapkan oleh setiap *Undagi* (ahli bangunan tradisional Bali) dengan segala konversinya, dalam mengkonversi ini belum tentu memiliki nilai kuantitatif atau nilai nominal yang sama antara seorang *Undagi* satu dengan *Undagi* lainnya. Ini terjadi karena dalam mengkonversi nilai kualitatif tersebut

seorang *Undagi* berhak menafsirkan konsep tersebut sesuai dengan referensi yang ia miliki, sesuai dengan kemampuan *Undagi* menyerap kondisi-kondisi riil si pemilik bangunan maupun kemampuan *Undagi* dalam menangkap harapan-harapan si pemiliknya, serta si *Undagi* juga harus memperhitungkan kondisi site atau tempat dimana bangunan tersebut hendak didirikan. Jadi sang *Undagi* tidak serta merta begitu saja memindahkan teks tersebut ke dalam bentuk metrik sebagaimana terjadi dalam penafsiran *bhisama kesucian pura* ini, yakni teks "apeneleng agung" menjadi ukuran metrik = 5 km. Nampaknya diperlukan pemikiran-pemikiran lebih lanjut guna membedah pola - metode maupun teknik para pendahulu manusia Bali ketika konsepsi atau *bhisama* tentang kesucian pura itu dituturkan kepada orang Bali. Sebagaimana contoh yang telah diberikan sebelumnya.

Konsepsi "apeneleng agung" dalam *bhisama kesucian pura* adalah suatu konstruksi (konsep yang abstrak) yang lahir dari tingkat kesucian/keluhuran niat dari pendahulu orang Bali untuk menjaga keharmonisan alam jagad Bali. Yang nampaknya dalam kelahiran konsep tersebut memang belum pernah dituangkan dalam suatu konversi fisikal ataupun metrik, tidak pernah ada suatu referensi yang memunculkan nilai-nilai kuantitatif sebagaimana harapan dalam diskusi perdebatan dan persilangan pendapat tentang kesucian pura selama ini. Lalu tentu timbul pertanyaan: lantas bagaimana orang dulu atau *Undagi* bisa mengkonversi atau melakukan transformasi, atau apa langkah yg dilakukan oleh para *Undagi* ketika membaca referensi untuk membangun bangunan yang dikenal sebagai Arsitektur Tradisional Bali?. Sang *Undagi* membaca suatu aturan tentang jarak *saka ke saka*, ia melakukan pemilihan terhadap berbagai jenis *gegulak* yang tersurat dalam referensinya. Biasanya sang *Undagi* tidak pernah memperoleh angka metrik yang bisa langsung diterapkan untuk proses perancangan pembangunan Arsitektur Tradisional Bali, terlebih dahulu sang *Undagi* memahami rumusan yang mengikuti teks dalam penentuan jarak *saka* itu.

Tentang teks-teks yg memuat aturan-aturan dalam Arsitektur Tradisional Bali itu banyak versinya, yang tersebar di seluruh Bali. Sebuah penelitian tentang kajian teks masalah arsitektur dan tata ruang tradisional Bali mengungkap terdapat 8 (delapan) sumber teks tradisional yang dibahas, kemudian di *Building Information Centre* Bali atau BIC-Bali (sekarang lembaga ini bernama Balai Penelitian Teknik Pemukiman Tradisional Bali atau BPTPT. Bali) Sanur, menerjemahkan sekitar 16 buah naskah Arsitektur Tradisional Bali (yang dibuat pada tahun 1970 hingga tahun 1980-an). Yang mana jika disimak isinya ternyata ada rumusan-rumusan yang berbeda untuk satu obyek bahasan. Ini berarti bahwa referensi tradisional di suatu daerah dengan daerah lainnya belum tentu sama bunyi atau isinya dalam menyuratkan aturan-aturan pembangunannya. Kembali ke jarak *saka* yang dibahas sebelumnya, sang *Undagi* yang telah memilih *gegulak*, misalnya dipilih jarak *saka*-nya yang bernilai kualitatif "prabu wibuh", prabu berarti raja penguasa jagat sedangkan *wibuh* berarti besar, jadi kalau dimaknai *gegulak* jarak *saka* itu berarti: penguasa atau raja yang memiliki kekuasaan sangat besar. Ini jelaslah bukannya sebuah jarak yg dpt sedemikian rupa dpt diterapkan dim proses ATB. sang *Undagi* akan melirik rumusan yang merupakan penjelasan terhadap *gegulak* dimaksud itu, sang *Undagi* lantas menemui sebuah rumusan yang berkaitan dengan teks itu, bahwa untuk *gegulak* "prabu wibuh" itu adalah berukuran *abah saka* (tinggi *saka* yang direbahkan) ditambah dengan *pengurip abuntar* (ukuran toleransi sesuai dengan harapan si pemilik bangunan). Dari turunan teks awal yang berbunyi "prabu wibuh" menjadi suatu kalimat "*abahan saka* dengan pangurip abuntar", untuk dapat disimak bersama maka perlu diturunkan bunyi aslinya sebagaimana tersurat dalam naskah *asta-bumi* karya I made Gambar sbg berikut :

“muah sikut rongan dawa, aebah sesaka maurip anyari, mantri ngelayang, ngaran. Aebah sesaka, maurip asirang, mantri sasaran, ngaran. Aebah sasaka maurip abuntar, parabu wibuh, ngaran, ika pada wenang angge”

Dengan arti atau terjemahan bebasnya sebagai berikut :

“kemudian ukuran/jarak tiang pada arah memanjang, yakni sepanjang rebahan tiang dengan pelebihnya *anyari* (selebar satu jari) disebut mantri ngelayang. Yang ukurannya serebahan tiang dengan pelebihnya *asirang* (diagonal penampang tiang) disebut *mantri sasaran*. Bilamana ukurannya serebahan tiang ditambah pelebihnya *abuntar* (ada beberapa makna tentang abuntar) disebut *perabu wibuh*, itu semua ukuran-ukuran yang bisa atau boleh dipergunakan.”

Jika sang Undagi menyimak kata-kata pada *gegulak* itu, maka setelah memilih *gegulak* jenis “prabu wibuh” segera sang Undagi bersangkutan menyimak pula rumusannya yang berbunyi “aebahan saka maurip abuntar”. Pada tahapan ini, beberapa Undagi akan memberi makna berbeda pula, jika pandangannya berbeda-beda memaknai kata-kata atau bunyi rumusan itu, Contohnya ketika membaca *aebahan saka*, semua sepakat dengan kata *aebahan saka* yang bermakna satu tiang yang direbahkan. Disini tidak timbul perbedaan dalam penafsiran kata bersangkutan itu (aebahan saka). Namun besar kemungkinannya akan berbeda dalam ukuran metriknya atau konversinya. Dimana seorang Undagi memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan beberapa pilihan/alternatif dalam menentukan ukuran tinggi tiang/*saka* itu. Karena ada refrensinya dalam *Asta kosala/Asta kosali* yang menyebutkan ada sebeias jenis *gegulak saka*, seperti : *mitra asih, sanghyang kundania, prabu nyakra Negara, sanghyang sidadana, betara asih, sanghyang angwerat, boga asih, sanghyang udaygni, sanghyang kumarayadnya, sanghyang kumara adnyana, dan sanghyang gni muka*. Tentu masih ada versi lainnya untuk menentukan panjang atau tinggi *saka* sesuai dengan referensi yang dibaca oleh si *Undagi*.

Inti dalam memilih *gegulak* panjang *sesaka* adalah mempertimbangkan peranan si pemilik bangunan di masyarakat (profesinya), mempertimbangkan kemungkinan harapan-harapan si pemilik untuk mewujudkan keinginannya dalam bangunan itu, mempertimbangkan teknis konstruksi terkait dengan kemampuan bahan, baik itu kekuatan ataupun keawetan kayunya serta pertimbangan estetika yang dimiliki oleh si Undagi sendiri dalam menentukan pemilihan alternatif yang tersedia itu. Yang mana dalam penentuan itu sang *Undagi* tidak pernah begitu saja membuka nama-nama pilihan yg akan dipergunakan dalam penentuan panjang *saka* kepada pemiliknya.

Kemudian jika *saka*/tiang terpilih sudah ditentukan, misalnya dipergunakan jenis *gegulak saka* “mitra asih”, maka ini pun merupakan topik diskusi yang tak habis-habisnya. Karena *gegulak* “mitra asih” punya makna tersendiri jika hanya dilihat makna kata saja, yang diartikan sebagai “disukai para sahabat” dan setelah ditelusuri rumusan ikutannya akan ditemui sastranya sebagai berikut :”19 rai, maurip saguli linjong”. Rumusan terakhir ini seakan mulai terlihat konsep- konsep yang mendekati realitas ukuran *saka* secara kuantitatif, namun masih juga memberikan ruang gerak dalam perbedaan nilai nominalnya.

Setiap *Undagi* sudah pasti memiliki kesepahaman ataupun kesepakatan dalam memahami istilah “19 rai”, yang dimakna sebagai ukuran kelipatan 19 lebar *saka*, jelas disini tidak ada perbedaan penfsiran lagi. Namun ternyata

tidak demikian halnya ketika mereka memilih ukuran *rai saka* tersebut. Sebab sebagaimana diketahui setiap *Undagi* memiliki refrensinya masing-masing (analog dengan setiap *Undagi* adalah alumnus dari sebuah perguruan tinggi yang berbeda-beda, artinya masing-masing *Undagi* punya refrensinya sendiri-sendiri). Ada dua metoda dalam menentukan ukuran lebar saka atau “rai” dimaksud dalam *geguiak saka* itu, pertama lebar saka atau “rai” saka ditentukan oleh ukuran tumpukan uang kepeng, satu refrensi menyebutkan ada ukuran sbb :

“.....mwah sikut sesakan bale magengnya, sikut satus ngemet, wenang ngangge dening wong akweh, ”

artinya:

“..... kemudian ukuran besarnya tiang adalah ukuran seratus pas, ukuran ini boleh dipakai untuk umum atau orang kebanyakan,”

Penafsiran banyak muncul, bahwa yang dimaksudkan dengan kata “seratus pas” itu adalah tumpukan seratus uang kepeng yang tentunya tebal tipisnya uang kepeng akan menentukan pula dalam ukuran nominal dari tebal tiang.

Kedua, lebar *saka* atau “rai” *saka* ditentukan oleh ukuran “guli”. Ada 5 (lima) jenis ukuran dalam hal ini, pada kajian saat ini tidak dibentangkan lagi. Yang perlu diamati disini adalah bahwa penentuan ukuran “rai” tiang adalah ditentukan oleh ukuran “a guli”. Disinilah muncul banyak versi dalam mendapatkan nilai nominal “rai” tiang dimaksud.

Konsepsi “a guli”, lantas menjadi obyek kajian yang sangat serius, sama halnya dengan seriusnya masyarakat Bali saat ini untuk membahas gagasan *bhisama* kesucian pura yang mengetengahkan konsepsi abstrak “apeneleng agung”.

Di lapangan ada ditemukan bahwa untuk nilai nominal “rai” tiang diambil dari panjang jari telunjuk, pada lain tempat ada pula yg memberikan informasi bahwa “rai” diambil dari jarak kedua mata di kepala. Rai dimaknai sebagai “prerai” yang berarti muka/kepala. Dengan adanya berbagai variasi yang sedemikian tersebut, tentunya seorang *Undagi* tidak boleh dibuat bingung oleh berbagai metoda berbagai teknik yang diajukan. Yang terpenting bahwa seorang *Undagi* harus konsisten dalam menerapkan metoda dan teknik yang diterapkan dalam suatu pembangunan.

Bertitik tolak dari pola kerja para *Undagi* mengkonversi jarak *saka* ke *saka* dari suatu bangunan Arsitektur Tradisional Bali, maka alangkah bijaknya bilamana dalam mengkaji jarak kesucian *Pura* terhadap bangunan lainnya juga diformat dengan pendekatan tersebut. Dimana saat ini *bhisama* kesucian *Pura* dalam bentuk teks “apeneleng agung” telah disepakati bersama sebagai suatu pedoman yang tidak mendapat pertentangan dan perselisihan, hanya terjadi dalam menjabarkannya ke dalam suatu nilai nominal untuk dapat diterapkan pada setiap daerah balik kota/kab. Konstruksi “apeneleng agung” adalah sebuah nilai kualitatif yang lahir dari para rohaniawan Bali (baik itu rohaniawan yang nyeni maupun rohaniawan yang ilmuwan sekaligus budayawan), yang tujuannya adalah menjaga kelestarian alam jagad Bali itu sendiri sehingga manusia Bali bisa hidup tentram dan sejahtera adanya. Nilai dari konstruksi “apeneleng agung” ini dikenal sebagai nilai abstrak (monument maya) dalam ukuran-ukuran tradisional,

yang untuk selanjutnya ingin dijabarkan dan diwujudkan dalam kondisi yang terukur (*tangible*, sebagai monument fisik). Untuk dapat sampai ke keadaan yang *tangible* dari suatu kondisi abstrak dibutuhkan suatu proses atau langkah-langkah yang menjembatannya berupa kajian-kajian yang mentransformasikan konsep abstrak (konstruksi) itu sehingga menjadi riil adanya (monument fisik berupa jarak kesucian), nah, langkah-langkah atau proses ini dikenal sebagai suatu langkah yang *intangible* (wak/karya, monument aktivitas). Sejatinnya proses *intangible* ini telah dilakukan, hanya saja ada suatu kekeliruan dalam keterlibatan pihak-pihak yang sepatutnya membahas topik ini.

Jikalau dipilah dalam suatu kajian holistiknya, yang terlibat dalam perdebatan mengenai konstruksi “apeneleng agung” ini ada 3 (tiga) kelompok dimana wisatawan dan usahawan (termasuk di dalamnya investor) yang menikmati monument fisik ini (yang lahir dari monument maya) tergabung menjadi kelompok 1, sedang para pejabat pemerintah yang memprakarsai aturannya dalam suatu proses pembentukan/ pengkajian nilai-nilai tak terukur menjadi terukur ini adalah kelompok 2, pejabat pemerintahan inilah yg banyak peranannya dalam memprakarsai atau yang punya gagasan dalam suatu bentuk monument aktivitas, sedangkan para ilmuwan, seniman serta rohaniawan yang banyak berpegang pada sastra-sastra suci dan menguasai olah rasa, olah pikir maupun olah batinnya banyak berperan dalam hal membidani nilai-nilai tak terukur (monument maya) menjadi nilai-nilai terukur (monument fisik). Tentunya dapat dipahami bilamana seorang wisatawan yang punya minat besar akan mempelajari secara intens nilai-nilai dari monument maya ini dan bahkan kemudian punya andil besar dalam mewujudkan monument maya, namun untuk kondisi seperti ini maka wisatawan bersangkutan sudah berpindah posisi sebagai seniman atau sebagai ilmuwan dalam kelompok 3 di atas. Jadi, dalam perdebatan yang telah terjadi tentang isi *bhisama*, adalah suatu hal yang sangat wajar sekali tumbuh suatu image/kesan di masyarakat Bali dalam proses pembahasan isi *bhisama* kesucian pura ini, bahwa ada pihak-pihak pejabat yang seharusnya berperan sebagai penggagas maupun pelaksana dan monument fisik ini, ikut bermain dalam proses membangun monument aktivitas dengan cara berperan sebagaimana layaknya seorang wisatawan maupun seorang investor. Jelas sekali, sudut pandang (*angle shot*, *wide horizon*) seorang wisatawan, seorang usahawan sangat berbeda dengan sudut pandang para rohaniawan, ilmuwan serta para seniman di Bali khususnya ketika memandang suatu monument maya akan menjadi suatu monument fisik. Disinilah letak kekeliruan dalam perdebatan dan persilangan pendapat pembahasan isi *bhisama* tersebut.

Kekeliruan tersebut bukanlah menjadi bahan kajian dalam forum ini, namun yang lebih diharapkan dalam diskusi ini adalah apa makna yg telah/dapat kita petik dari diskusi ini, ada pun makna dari *bhisama* kesucian pura adalah:

1. mengayomi semua pikiran-pikiran yang luhur, niat baik, bertujuan demi kesejahteraan bersama, menjaga keberlangsungan alam (kontinuitas). Disini berarti boleh ditafsirkan apa saja, dengan satu landasan yakni niat baik nan luhur secara konsepsi bermakna langit yang mengayomi (suwung), bermakna jiwanya sebuah kehidupan.
2. apapun hasil terjemahan maupun tafsirnya, semua dijalankan secara berkelanjutan, tidak ragu-ragu, tidak berubah-ubah dan tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi lainnya (ekonomi, politik). Secara material dipercaya dan diyakini sebagai materi yang menetap serta konsisten isinya (bermakna badan-angka sarira).

3. pelaksanaannya, memberikan ruang gerak yang mengikuti hukum alam, ubi ditanam ubi jua dipetik. Cabe ditanam cabe jua dipetik. Tindakannya (lakunya) tegas membimbing, mencerahkan serta mengadili.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Demikian sepercik ungkapan hati/niat yang tulus dalam hiruknya perdebatan dan persilangan pendapat mengenai topik isi *bhisama* tentang kesucian Pura. Dan sebagaimana telah ditegaskan pada awal ungkapan hati ini, bahwa hasil dari kajian ini bukan untuk memberikan pemecahan masalah (problem solving) melainkan lebih kepada penekanan menguraikan permasalahan yang telah muncul tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimastra, I Ketut (2001). *Saka dalam Arsitektur Tradisional Bali, Suatu Kajian Teknologi – Estetik – Konstruktif* (dimuat pada majalah Ilmiah Universitas Dwijendra “Widyasrama” Desember 2001)
1. Adhimastra, I Ketut (2002). *Sikut Pekarangan dalam Arsitektur Tradisional Bali, Suatu Perbandingan dengan Rumusan Arsitektur Modern* (dimuat pada majalah Ilmiah Universitas Dwijendra “Widyasrama” September 2002)
 2. Adhimastra, I Ketut (2003). *Implementasi Antropometri pada Gegulak Bangunan Bali dari sudut pandang Nilai Ideal, Instrumental dan Praktis*. (dimuat pada proseding Seminar Nasional Ergonomi di Yogyakarta 5 April 2003. ISBN-979-95752-4-9)
 3. Anonim, 1945. *Asta Kosali (L.05.A)*. Alih aksara oleh Gelebet dari aslinya dalam aksara Bali milik Pedanda Made Sidemen dari Geria Taman Sanur, Denpasar.
 4. Gelebet, IN. 1982. *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali tahun 1981/1982.
 5. Gelebet, IN. 1984. *Landasan Filosofis Gegulak dan Penerapannya*. Disampaikan dalam Sabha Arsitektur Bali.
 6. Kagami, H. 1988. *Balinese Traditional Architecture In Process*. Little World Museum of Man, 90-48 Imai-Narusawa, Inuyama, Aichi, 484 JAPAN.
 7. KEPUTUSAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT (PHDIP), Nomor : 11/KEP.I/PHDIP/1994 tanggal 25 Januari 1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura
 8. Kerthiyasa dan Tim Perumus Sabha Arsitektur, 1984. *Rumusan Arsitektur Bali*. Hasil Sabha Arsitektur Tradisional Bali.
 9. Nala, I Gusti Ngurah (2004). *Murddha Agama Hindu*. Upada Sastra, Denpasar;
 10. Ngoerah, IGNG; dkk. 1981. *Inventarisasi Pola-pola Dasar Arsitektur Tradisionil Bali*. Laporan Penelitian Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 11. Pendit S Nyoman, (2007). *Sad Dharsana*, Pustaka Bali Post - Denpasar

12. Sumaryono E (1983). *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius - Jakarta
13. Suamba, Putu IB (2003). *Dasar-dasar Filsafat India*. Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma;
14. Saifuddin, A. 1999. *Dasar-dasar Psikometri*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.